

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Federasi Rusia lahir dari integrasi yang terjadi di Uni Soviet. Dimana Uni Soviet adalah Negara yang berideologi komunis telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan Federasi Rusia. Namun dengan berjalannya waktu Federasi Rusia berusaha mengubah system pemerintahan yang otoriter menuju kearah yang lebih demokratis. Itu semua ditandai dengan proses pemilu untuk pertama kali yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat Rusia pada pemilihan presiden Boris Yeltsin. Kemudian berlanjut pada masa kepemimpinan Vladimir Putin 2000-2004 dan pada periode ke dua 2004-2008 yang mengupayakan perkembangan demokrasi di Rusia. Para pendukungnya dan masyarakat Rusia menilai gaya kepemimpinan Putin yang tegas dan cenderung otoriter dianggap sesuai kondisi kontemporer Rusia dalam masa transisi yang sulit. Pro dan kontra terhadap gaya kepemimpinan Putin sekaligus memperlihatkan dilema kehidupan demokrasi Rusia.

Banyak pihak luar menganggap kekhawatirannya mengenai rezim Putin yang justeru dianggap telah membatasi kebebasan dan perkembangan demokrasi. Putin dinilai telah mencederai demokrasi dengan memberlakukan pemerintahan terpusat dan menekan kebebasan

berpendapat. Selain itu juga Putin telah mematikan demokrasi. Namun, Putin selalu mengalihkan kritik-kritik dari luar mengenai demokrasi Rusia dengan hal lain yang notabene mengancam perkembangan demokrasi dan memberikan implikasi terhadap kebebasan warganegara Rusia.

Bahkan presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan gejala-gejala menghidupkan kembali Uni Soviet. Negara besar yang pernah membuat Negara-negara Barat ketakutan. Berdasarkan kondisi itulah, barangkali, Vladimir Putin yang menggantikan Yeltsin sejak tahun 2000, mulai mengagagas sentralisasi model zaman Uni Soviet.

Berdasarkan pemaparan diatas, kemudian penulis memilih judul “Dampak Kepemimpinan Vladimir Putin terhadap Demokrasi Rusia” sebagai judul skripsi ini. Mengingat Rusia merupakan Negara yang pada awalnya berideologi komunis. Selain itu juga proses peningkatan perkembangan demokrasi masih memerlukan perhatian khusus dikarenakan implikasi dan kritik dari luar terhadap demokrasi yang dikembangkan oleh Putin.

B. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Rusia sebagai pewaris garis politik Uni Soviet, dan beberapa republik Soviet lainnya sesungguhnya terjadi beberapa bulan sebelum kematian Uni Soviet. Federasi Rusia lahir dari integrasi yang terjadi di Uni Soviet, dimana Uni Soviet adalah negara yang berideologi komunis telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan federasi Rusia. Namun, dengan berjalannya waktu federasi Rusia berusaha

mengubah system pemerintahan yang otoriter menuju kearah yang lebih demokratis. Itu semua ditandai dengan proses pemilu untuk pertama kali yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat Rusia pada pemilihan presiden Boris Yeltsin.

Identitas Rusia pada mulanya dipimpin oleh Knyas kemudian beralih menjadi Tsar, pada masa inilah struktur pemerintahan Rusia mulai terbentuk. Imperium Rusia Raya (Tsar) dimana pemerintahnya bersifat otokrasi, ototiter dan terpusat. Setelah masa Imperium Tsar runtuh kemudian digantikan dengan terbentuknya Uni Soviet (USSR) sebagai sebuah negara yang terbentuk dari ide dibangunnya masyarakat sosialis, Uni Soviet menempatkan ide komunisme dan Partai Komunis pada posisi yang sangat sentral. Akibatnya, system politik yang monopartai dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini membawa konsekuensi pada tumpang tindihnya urusan pemerintahan dan urusan partai. Kemudian muncul berbagai masalah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya baik masalah politik maupun ekonomi, serta mengalami beberapa peristiwa yang kemudian membawa kondisi Rusia semakin memprihatinkan. Kemerosotan ekonomi akibat korupsi dan bobroknya birokrasi serta budaya politik yang makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. Melihat kondisi itu, Mikhail Gorbachev, tokoh paling muda yang pernah memimpin partai komunis dalam sejarah Uni Soviet, membuat gagasan pembaruan yakni ada tiga konsep pembaruan: Glasnost, Perestroika, dan Demokratizatsiya sebagai usaha pembaharuan terhadap

system ekonomi, social, dan politik Uni Soviet. Usaha Gorbachev untuk memperbaiki di segala bidang demi tercapainya masyarakat Uni Soviet yang lebih baik, ternyata mendapat berbagai protes di Uni Soviet dan pada akhirnya perubahan itu memunculkan elit-elit pemerintahan yang disebut kelompok reformis yang ingin menciptakan demokratisasi. Bangsa itu hanya mengetahui bahwa melalui demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan kehidupan akan lebih mudah tercapai tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggerakkan ekonomi dalam suasana demokratis. Ketidakmampuan Gorbachev dengan tiga konsep pembaruannya itu untuk mewujudkan kondisi Uni Soviet yang lebih baik, akhirnya pada tanggal 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet, gagal dengan gagasannya, dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet.

Uni Soviet runtuh, menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. RSFSR yang kemudian menjadi Federasi Rusia adalah kepingan terbesar bekas negara adikuasa tersebut, yang sekaligus memiliki hak sebagai pewaris kebesaran Uni Soviet. Namun demikian pecahnya Uni Soviet meninggalkan beberapa persoalan krusial yang harus segera diatasi demi keberlangsungan perikehidupan masyarakat dan peradaban bangsa Rusia.

Presiden pertama yang memimpin Federasi Rusia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin atau yang lebih familiar dengan Boris Yeltsin,

dimana proses pemilihan umum untuk memilihnya dilakukan secara langsung oleh rakyat Rusia. Pemilu yang pertama kali dilakukan secara langsung itu menandai adanya proses perubahan dari masa pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Pada masa Boris Yeltsin, demokratisasi yang merupakan pilar perestroika dilanjutkan pada masa pasca-komunis ini. Yeltsin melanjutkan cita-cita dan harapan Gorbachev dengan upaya menciptakan Rusia yang lebih demokratis. Yang tidak ada pada pemerintahan Rusia adalah peran sentral Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dan polisi rahasia (KGB). Yeltsin mempunyai hak mutlak sebagai penguasa dan presiden. Namun dibawah kepemimpinannya, demokrasi pun tidak berjalan seperti apa yang diteorikannya, seperti demokratisasi yang pernah dijalankan oleh pemimpin Uni Soviet Gorbachev, namun mereka sama-sama mengalami hambatan. Pemerintahan Yeltsin sangat dekat dengan kaum oligarkh' sangat terlihat adanya pemisahan antara kaum elit para orang kaya baru (OKB) dengan masyarakat biasa, Yeltsin lebih dictator, lebih mengutamakan yang menguntungkan posisi dirinya seperti membubarkan parlemen yang banyak diprotes oleh kelompok konserfatif garis keras yang menentang perubahan radikal dalam politik dan ekonomi. Kuatnya kekuasaan presiden Boris Yeltsin yang selalu memanfaatkan situasi politik untuk mencapai apa yang ia inginkan tentunya sangat menghambat proses demokratisasi di Rusia.

Yeltsin mengakhiri masa jabatannya sebelum masa tugasnya yang kedua berakhir. Pada saat ia mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 Desember 1999, ia menunjukkan Vladimir Putin yang saat itu sebagai PM untuk menjadi *acting* Presiden sekaligus mengumumkan sebagai 'putra mahkota' yang akan memimpin Rusia selanjutnya.

Konstitusi tahun 1993 mengatakan bahwa Rusia merupakan negara demokratik, federatif dan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang dengan bentuk pemerintahan republik. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu Eksekutif, Legislative dan Yudikatif. Kebinekaan ideology, agama diperkenankan, sedangkan ideology negara yang bersifat memaksa sudah tidak berlaku lagi. Hak untuk mengadopsi system politik multi partai dijunjung tinggi. Jadi, system politik Rusia adalah system politik multi partai sejak dipilihnya model demokrasi perancis.

Terpilihnya Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia pada pemilu peresiden tanggal 26 Maret 2000 dengan perolehan suara sebanyak 52,94%, dan secara resmi Vladimir Putin menjabat sebagai presiden kedua Federasi Rusia pada tanggal 7 Mei 2000. Tidak dipungkiri bahwa pada awalnya Vladimir Putin kurang dikenal dikalangan politik Rusia. Namun ia telah membuktikan dirinya mampu terpilih menjadi presiden kedua Federasi Rusia. Hal ini karena ia telah menunjukkan kemampuan dirinya memimpin Rusia dibanding presiden sebelumnya. Vladimir Putin dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa bagi rakyat Rusia. Dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, ia diyakini dapat

membawa Rusia ke kejayaan seperti dimasa lalu di era Uni Soviet. Vladimir Putin sebagai presiden kedua Rusia setelah Boris Yeltsin, membawa kebijakan-kebijakan baru yang mengarah kepada perbaikan kondisi politik dan ekonomi Rusia. Dimana pada pemerintahan Boris Yeltsin telah meninggalkan perekonomian yang buruk, masalah korupsi dan masalah para pemberontak atau gerakan sparatis Chehnya. Putin memiliki pandangan sendiri dalam mengusung ide-ide reformasi itu dalam kerangka penyelamatan bangsa Rusia dari krisis ekonomi dan krisis politik yang telah melilit sejak lahirnya “kembali” negara itu.

Kemampuan Vladimir Putin dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak lepas dari popularitas Vladimir Putin dalam memperjuangkan demokrasi di Rusia. Dan partai sebagai pendukung berlangsungnya atau berjayanya masa kepemimpinan Vladimir Putin seperti partai Rusia bersatu yang lahir dari balik tembok Kremlin akhir tahun 1999 dianggap memiliki keistimewaan, karena ditangan Kremlin partai ini mampu menguasai media. Semua mesin politik berada ditangan mereka, sehingga mudah untuk menundukan lawan-lawan politiknya. Ketangguhan Vladimir Putin sebagai calon kuat untuk memimpin Rusia dari kubu partai Rusia Bersatu tersebut telah terbukti dengan terpilihnya kembali Putin sebagai pemimpin Rusia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dalam hal ini tidak lepas dari peran media sebagai alat kampanye Vladimir Putin untuk melancarkan segala misinya agar bisa diterima dan didukung oleh masyarakat Rusia.

Putin yang mempunyai latar belakang sebagai anggota KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), yakni Lembaga Polisi Rahasia yang bertugas mengawasi setiap aktifitas warga Negara yang dianggap subversive atas nama stabilitas dan keamanan Negara. Lembaga keamanan tersebut dalam sejarah Rusia khususnya pada masa Uni Soviet memiliki banyak nama namun KGB adalah nama yang paling populer. Putin yang diangkat menjadi Direktur Dinas Keamanan Federal (FSB) yang dulu bernama KGB.¹ Pemerintahan Putin bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Rusia yang mengalami kemerosotan akibat pemerintahan sebelumnya serta berupaya mengembangkan demokrasi di Rusia. Namun pemerintahan Putin banyak mendapat reaksi baik nasional maupun internasional. Latar belakang Putin dengan KGB menjadikan Putin dalam memimpin Rusia terkesan tegas dan cenderung otoriter, kondisi ini menjadi kekhawatiran masyarakat Internasional akan perkembangan demokrasi di Rusia akibat kepemimpinan Putin yang semakin represif.

Pemerintahan Rusia justeru dianggap mematikan demokrasi karena menghapuskan pemilu langsung untuk posisi Gubernur, memberlakukan aturan-aturan baru yang membatasi dan larangan untuk menggelar protes atau demonstrasi.² Sedangkan untuk system politik di Rusia merupakan system politik yang multi partai sejak dipilihnya model demokrasi.

¹ Fahrurroddi, A. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar –belakang Budayanya; Pengantar: Rachmat Witoelar; edisi: 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005. Hal. 203

² *Rusia Ajak AS Bekerja Sama*. KOMPAS 08 Juni 2007

Demokrasi terpusat mengakibatkan kebebasan perkembangan demokrasi yang sebenarnya menjadi terhambat, bahkan mencederai demokrasi.

Dengan kondisi seperti itu, presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan gejala-gejala akan menghidupkan kembali Uni Soviet. Negara besar yang pernah membuat Negara-negara Barat ketakutan. Pada masanya, Uni Soviet merupakan adi daya di belahan bumi bagian timur. Sehingga ditasbihkan sebagai pimpinan Blok Timur untuk melawan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS).

Dari ulasan diatas menunjukkan bahwa potret demokrasi di Rusia masih jauh dari harapan dan masih buram. Bahkan adanya gejala-gejala bahwa Putin akan menghidupkan kembali Uni Soviet. Dan puncak dari potret demokrasi tersebut adalah dihapuskannya pemilihan umum langsung untuk posisi gubernur. Dengan latar belakang Vladimir Putin dan gaya kepemimpinannya itu memberikan dampak terhadap perkembangan demokrasi Rusia.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas: “Bagaimana dampak kepemimpinan Vladimir Putin terhadap demokrasi Rusia?”

D. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai implikasi dari system demokrasi di bawah kepemimpinan presiden Vladimir Putin di Rusia, yang telah memberikan dampak terhadap kebebasan warganegara dan pemerintahan Rusia.

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literature tentang Negara Federasi Rusia dan penulisan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang demokrasi yang dikembangkan Vladimir Putin di Rusia. Selain itu, penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah diperoleh penulis selama kuliah. Dengan demikian diharapkan penulisan ini dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan diri penulis. Tujuan yang tidak kalah penting adalah penulisan ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk membahas permasalahan diatas, penulis mencoba menggunakan:

Konsep Demokrasi

Dalam arti harfiahnya, demokrasi (Inggris: *democracy*) dari bahasa Yunani, yakni *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan (oleh) rakyat. Sebagaimana diungkapkan Giddens bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna suatu system politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan raja atau bangsawan.³ Pendapat lain dari

³ Ghofur Abdul. *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi atas pemikiran Gusdur)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002. hal 15

Diamond, Linz dan Lipset yang di ilhami pemikiran Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai:

*“Suatu system pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: **Kompetisi** yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk merebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; **Partisipasi politik** yang melibatkan sebanyak mungkin warganegara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok social (warganegara dewasa) yang dikecualikan; dan satu tingkat **Kebebasan sipil dan politik**, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik”.*⁴

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.

⁴ Mas' Oed Mohtar. *Negara, Kapital Dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1994

3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala Negara saja, jadi wakil presiden ataupun perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil.
5. Jika Negara itu secara budaya homogen, atau heterogen, tidak terbagi-bagi kedalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpinnya harus berhasil dalam suatu tatanan konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
6. Jika Negara itu memiliki suatu budaya politik dan keyakinan, terutama dikalangan aktivis politik, yang mendukung lembaga-lembaga demokrasi.
7. Jika Negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak Negara luar yang bermusuhan terhadap demokrasi.⁵

Menurut Samuel P Huntington, factor-faktor yang menghambat demokratisasi di beberapa Negara dapat dibagi kedalam tiga kategori besar yaitu:

1. Politik adalah sebuah penghalang dibidang politik yang secara potensial signifikan terhadap perkembangan demokrasi adalah tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada Negara-negara yang

⁵ Robert A Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

masih otoriter dan akan menjadi kaum konservatif yang dengan keras menentang proses demokratisasi.

2. Budaya, tradisi budaya yang bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran norma-norma demokrasi didalam masyarakat, yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga demokrasi sehingga akan menghalangi munculnya dan berfungsinya institusi-institusi tersebut secara efektif.
3. Ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu Negara karena itu demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di suatu Negara.⁶

Di Rusia, yang baru melakukan transisi kearah pemerintahan yang demokratis hanya dalam decade terakhir abad itu saja demokrasi itu amat rapuh dan lemah dukungannya. Bahkan di negara-negara dimana demokrasi telah lama berdiri dan tampaknya cukup mantap, beberapa pengamat percaya bahwa demokrasi itu berada dalam keadaan krisis atau sekurang-kurangnya amat terhambat oleh mundurnya kepercayaan warga negara.

Sebuah system demokrasi yang stabil, seperti yang dianjurkan oleh negara-negara barat terhadap negara-negara bekas komunis, harus terinstitusionalisasi dalam lingkup negara dan mempergunakan, memanfaatkan sebuah keterlibatan dari semua pihak dalam memberikan

⁶ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995.

kerjasamanya. Transisi Rusia dari komunisme ke kehidupan demokrasi, jika benar hal tersebut yang terjadi di Rusia saat ini, benar-benar berjalan dengan keras dan penuh gejolak. Rusia adalah negara yang berdiri tanpa adanya sejarah demokrasi yang kuat. Sejarah Rusia diwarnai oleh pemerintahan otoriter sejak zaman Tsar Rusia selama ratusan tahun hingga ketika rezim komunis yang totaliter berkuasa.

Sangat sulit untuk mengartikan kata "demokrasi" terhadap setiap orang Rusia, namun faktanya rakyat Rusia hanya memiliki sedikit pengalaman atau bahkan tidak memiliki keahlian dalam kehidupan demokrasi yang mensyaratkan hal-hal penting seperti, kebebasan berbicara, kebebasan pers, pemilu yang teratur dan bebas untuk memilih pejabat, nilai-nilai mayoritas, supremasi hukum, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang pengadilan.

Sejauh ini, Rusia nampaknya tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan bagi berlakunya sebuah system demokrasi yang stabil. Semua syarat-syarat tersebut tidak dijalankan secara sepenuhnya, namun hanya dilakukan oleh beberapa bagian dari unsur-unsur kekuasaan pemerintah. Upaya memperjuangkan hak dan kewajiban rakyat Rusia belum terlaksana dengan baik, dan dibiarkan apa adanya terhadap rakyat. Lembaga-lembaga independen yang berusaha menjembatani pemerintah dengan rakyat Rusia, yang dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan politik antara rakyat dan negara, telah terbentuk namun belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik.

Konsepsi komunis yang dianut oleh Rusia untuk demokratisasi adalah penghancuran kapitalisme dan pembentukan perekonomian yang dikuasai oleh Negara. Kalau kaum komunis berbicara tentang demokrasi, bukanlah pemerintahan dari rakyat atau oleh rakyat, akan tetapi suatu kebijakan dijalankan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan sebagian besar masyarakat atau demi kepentingan kelompok minoritas.⁷

Melihat pemikiran Dahl mengenai demokrasi pada masa sebelum Putin sudah adanya upaya untuk mengenalkan dan mengembangkan demokrasi di Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, struktur pemerintahan Rusia pun berubah, untuk pertama kalinya Rusia mengadakan Pemilu yang demokratis pada tahun 1993 dan melahirkan banyak partai-partai baru. Ini menandai sudah adanya partisipasi dan kompetisi politik dalam pemerintahan saat itu. Dan Federasi Rusia menjadi salah satu Negara yang menerapkan system multi partai dalam setiap pemilunya. Pemilihan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali untuk memperebutkan kursi di *Kremlin*⁸. Pemilu tahun 1999 ada sekitar 26 partai politik yang ikut ambil bagian dalam pesta pemilihan demokrasi⁹. Pergerakan revolusioner telah terjangkit di Rusia sejak awal abad XIX. Pergerakan yang secara umum menentang kekaisaran rusia ini di motori oleh kaum revolusioner dari berbagai kalangan. Situasi revolusioner ini dimanfaatkan oleh kaum marxis untuk mendorong keadaan pada titik klimaks berupa demonstrasi. Secara umum peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rusia merupakan

⁷ G.F.Aleksandrovi, *The Pattern of Soviet Democracy*, New York, St. Martin's Press, 1948.hal.27

⁸ *Kremlin*, adalah julukan untuk Parlemen atau pemerintahan Federasi Rusia.

⁹ www.Russia.com.

peristiwa besar dalam meletakkan landasan bagi berkembangnya demokrasi yang mengakibatkan perubahan besar di Rusia. Dan demonstrasi sebagai contoh bahwa mereka mempunyai hak untuk menyuarakan pemikiran mereka terhadap pemerintah saat itu. Langkah-langkah penting dalam upaya demokratisasi kehidupan social politik antara lain: penghentian penyelidikan “Kasus Dokter” (kasus atas tuduhan Stalin terhadap dokter istana yang diduga akan melakukan pembunuhan terhadap dirinya), masa Khurchev berusaha memberantas system komando administrasi-birokrasi. Yang menjadi tumpuan pada masa Stalin. Dalam kongres PKUS ke-20 tahun 1956 diputuskan hak dan kebebasan sipil diperluas. Memperluas hubungan dengan Negara-negara di dunia. Masa Gorbachev dengan *Glasnost*, *Perestroika* dan *Demokratizatsiya* nya berupaya untuk lebih terbuka baik di dalam negeri maupun luar negeri. Glasnost dan demokratisasi membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Dihapuskannya sensorship terhadap pers yang bersifat ideologis yang selama ini mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi. Ruang gerak para seniman *avant-garde* kembali dibuka, dunia perfilman pun tak kalah menggeliat. Kebebasan beragamapun mulai tersentuh angin keterbukaan. Dan pembungkaman yang tersistemasi selama tujuh dasawarsa telah mengakibatkan tidak terakomodasinya partisi public dalam proses kehidupan politik dan social mulai ditinggalkan dan kini lebih terbuka. Keterbukaan memperbolehkan suara yang selama ini dibatasi dan

dibungkam untuk muncul kepermukaan.¹⁰ Dari kompetisi, partisipasi dan kebebasan public dan politik sesuai pemikiran Dahl dalam masa sebelum Putin ternyata sudah diupayakan oleh pemerintah Rusia sebelumnya.

Teori Leadership/Kepemimpinan

Pemimpin merupakan orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Teori kepemimpinan yang menjadi dasar mengapa seseorang diangkat menjadi pemimpin antara lain; pertama karena sifatnya yang identik dengan karakteristik khas seperti fisik, mental dan kepribadian yang dikaitkan dengan atribut pribadi dari para pemimpin tersebut yang dianugerahi beberapa cirri yang tidak dimiliki orang lain. Diantaranya intelegensia, kepribadian, dan karakteristik fisik. Kedua; karena kepribadian perilaku serta ketiga karena situasi.¹¹

Istilah pemimpin berasal dari kata asing “*leader*” dan kepemimpinan dari “*leadership*”. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, kualitas hubungan atau interaksi antara si pemimpin dan

¹⁰ ¹⁰ Fahrurudji, A. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar –belakang Budayanya; Pengantar: Rachmat Witoelar; edisi: 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005.

¹¹ [Http://organisasi.org](http://organisasi.org)

pengikut dalam situasi tertentu, kepemimpinan menggantungkan diri kepada sumber-sumber yang ada dalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan.¹²

Ordway Tead dalam bukunya “The Art of Leadership” menyatakan Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang di inginkan.¹³

Ada beberapa gaya kepemimpinan yang seharusnya bisa diterapkan, antara lain:

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter/Authoritarian

Adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi kekuasaanlah yang sangat dominan diterapkan.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis/Democratic

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pimpinan memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

¹² Pamudji, S, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal.5

¹³ Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah pemimpin Abnormal itu?*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Gaya ini ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas/Laissez Faire

Pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur pemerintahan bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif.¹⁴

Dari beberapa gaya kepemimpinan yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Putin lebih cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang mengkombinasikan antara kepemimpinan yang otoriter dan demokrasi. Rusia akan tetap otoriter karena dari sejarahnya, dari masa Tsar, Uni Soviet hingga Rusia otoriter tetap ada dalam pemerintahannya. Sedangkan demokrasi akan tetap di jalankan sebagai tuntutan era globalisasi untuk keterbukaan demi tercapainya kerjasama ekonomi dan ini sangat jelas terlihat dalam pemerintahan Putin. Dimana kepemimpinan Putin dalam menjaga kekuasaannya ia lebih otoriter, tapi disisi lain ia juga berupaya mengembangkan demokrasi di Rusia. Walaupun terlihat dibatasi namun ia tetap berupaya menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan demokratis, Putin menunjukkan kepemimpinan yang mengarah kepada kepemimpinan

¹⁴ Mutia Hariati, *Leadership style Using the right one for your situation* , diktat kuliah, Jurusan Hubungan Internasional, Univ. Muhammadiyah Yogyakarta. 2007

demokratis, terbukti dari upaya mengembangkan demokrasi meskipun terlihat dibatasi dan sangat berhati-hati. Putin tetap berupaya mengembangkan pemerintahan yang demokratis sesuai tuntutan era globalisasi yang menuntut keterbukaan. Walau begitu tetap saja diseimbangkan dengan kepemimpinan yang otoriter guna mengontrol dan mengendalikan pemerintahannya agar tetap seimbang dan tidak mengulangi kebobrokan masa lampau. Dengan koalisi gaya kepemimpinan itulah Putin percaya bahwa ia akan mampu mengembalikan kejayaan Federasi Rusia seperti masa Uni Soviet dimana pada waktu itu Uni Soviet adalah negara adi daya di dunia. Meskipun tetap berupaya mengembangkan demokrasi tapi prosentase gaya kepemimpinan Putin cenderung lebih banyak mengarah kepemimpinan yang otoriter.

Di negara totaliter, rezim yang berkuasa sudah tentu menganut cara-cara yang otoriter, akan tetapi penguasa yang otoriter belum tentu totaliter. Totaliterisme: dominasi total berbeda dengan otoriterisme yang masih membolehkan lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat berfungsi bebas sepanjang tidak terlibat dalam kegiatan politik totaliterisme bertujuan mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ke dalam suatu pola politik tertentu. Struktur politik ini tidak saja mengharamkan semua oposisi, tetapi juga mencegah otonom lembaga masyarakat sampai ke struktur politik.¹⁵ Cirri khusus lain dari totaliterisme

¹⁵ Hannah Arendt, "*Asal-usul Totaliterisme*", Jilid III, Yayasan Obor Indonesia, Hal.105

adalah seperti penunjukan pejabat dari atas dan monopoli penunjukan-penunjukan ditangan satu orang. Pola system totaliterisme tersebut sama persis dengan penerapan system politik di Uni Soviet. Keputusan dan kewenangan hanya terdapat ditangan penguasa, komando sentralistik dari atas, begitu juga dengan partai. Dulu selain NAZI dibawah kepemimpinan Adolf Hitler di Jerman, kekuasaan Bolshevisme Soviet dibawah kepemimpinan Jossif W. Stalin (1922-1953) juga melaksanakan pemerintahan dengan system totaliterisme.

Dan kini, Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Putin telah berupaya menjadi pemimpin yang otoriter. Putin telah memimpin Rusia selama hampir dua decade dengan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter. Terbukti dengan melaksanakan system pemerintahan terpusat, penunjukan orang-orang yang dirasa pro Kremlin seperti penunjukan untuk posisi gubernur yang sudah tidak lagi melalui proses pemilihan umum melainkan ditunjuk langsung oleh Putin. Selain itu juga Putin selalu berupaya mengalihkan kritik-kritik yang masuk baik dari dalam negeri maupun Internasional terhadap pemerintahannya dengan wacana lain.

Kita melihat proses pembuatan keputusan dalam Kremlin, mungkin kita akan mendapatkan gambaran bagaimana nuansa politik elitis begitu kental di Rusia. Terdapat factor patrimonial-otoritarianisme dari kondisi structural politik dalam negeri Rusia. Otoritarianisme terlihat dari

sentralisme pemerintahan untuk mengontrol dan mendominasi negara dan tidak transparan pada masyarakat.

Lingkaran politik Rusia yang patrimonial ini bisa menjelaskan lingkaran konsentrik proses pembuatan keputusan dalam Rusia, yakni pola elitis dimana hanya segelintir orang yang dekat dengan patron dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. Lingkaran konsentrik sendiri merupakan sebuah konsep dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang mengansumsikan bahwa pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan pembuat keputusan

Putin sebagai pembuat keputusan utama, dan memiliki otoritas tertinggi dalam konstitusi Rusia. Dalam konstitusi Rusia, presiden mempunyai wewenang dan superioritas terhadap legislative Rusia, Duma. Secara strukturalis bias dikatakan bahwa system pemerintahan Rusia mendukung adanya nuansa otoritarianisme, karena legislative yang mengontrol pemerintahan berada dikendali pemerintahan. Jadi, dalam pemerintahan Rusia, Duma badan legislative Rusia tidak dimasukan kedalam lingkaran konsentrik, begitu pula media massa dan rakyat Rusia. Putin menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk membungkam lawan politiknya seperti Mickhail Khordokvsky dan, menggunakan instrumen kekerasan dalam mengatasi demonstrasi yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan Kremlin.

Masa Uni Soviet partai yang berkuasa adalah PKUS dan saat ini partai yang sangat dominan adalah Partai Rusia Bersatu yang notabene

partai dibalik kemenangan dan berjayanya pemerintahan Putin. Dan partai-partai yang dianggap tidak memberi kontribusi terhadap pemerintahan Putin tidak diperkenankan untuk berkembang, bahkan saat pemilu partai-partai tersebut di hapus dari daftar oposisi.

Kelompok oposisi saat ini praktis tak berdaya dan tercerai-berai. Dalam pemilu Desember 2007, diduga mereka akan lebih terpepet lagi karena adanya berbagai rintangan yang disiapkan kelompok Putin, antara lain dinaikkannya *electoral treshold* dari 5 menjadi 7% serta ditiadakannya pilihan suara *against all*, itu berarti peluang tokoh oposan seperti mantan PM Kasyanov dan juara catur dunia Gary Kaparov untuk berkuasa sangat kecil, sedangkan peluang bagi kelompok nasionalis ekstrem dibawah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintahan Putin menunjukkan gejala menghidupkan kembali kejayaan era Uni Soviet yang dictator dan berkuasa menjadi negara kuat diantara negara-negara lain di dunia. Gaya Pemerintahan seperti itu sangat menghambat proses perkembangan demokrasi di Rusia. Penekanan kebebasan masyarakat dan pers menjadikan Rusia berada dalam masa dilematis. Melihat beberapa bulan mendatang kiprah Putin berakhir dari jabatannya menjadi presiden Rusia. Namun ide dan reformasi yang di jalankan Putin harus tetap berjalan dan diteruskan oleh penerusnya nanti. Putin tetap mempunyai posisi dalam perjalanan naik dan turunnya perkembangan Rusia. Karena hingga kini dominasi Presiden Rusia Vladimir Putin belum tertandingi. Kemungkinan

besar pemimpin berikutnya tetap didominasi oleh kekuasaan Putin. Diibaratkan kekuasaan Putin seperti boneka matrioshka yang banyak dijual di pasar untuk wisatawan. Jika struktur kekuasaan di Rusia seperti boneka, Putin merupakan bagian terluar, sekaligus bagian di dalamnya yang berlapis-lapis yang tetap berperan dalam kekuasaan Rusia. Bahkan untuk perkembangan demokrasi serasa dimanipulasi karena pada kenyataannya kondisi demokrasi yang diharapkan dan diteorikan hingga masa jabatannya hampir selesai belum tercapai.

F. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada didukung dengan kerangka pemikiran yang diterapkan, maka dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa kepemimpinan Vladimir Putin dari tahun 2000 hingga sekarang di Rusia belum tercipta demokrasi pada system pemerintahannya. Dan dampak yang ditimbulkan oleh kepemimpinan Vladimir Putin terhadap demokrasi Rusia adalah:

- Perkembangan demokrasi di Rusia semakin diperhambat, dengan diberlakukan system pemerintahan terpusat.
- Federasi Rusia akan tetap mengembangkan demokrasi namun substansinya Federasi Rusia tetap otoriter, dilihat dari pemikiran Dahl tentang demokrasi yang meliputi:(Kompetisi, partisipasi politik, dan kebebasan sipil dan politik).

G. Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluar dari topic yang akan dibahas, maka penulis mencoba memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini. Penulis hanya akan membahas sepanjang perkembangan demokrasi di Rusia yakni perkembangan demokrasi pada masa kepemimpinan Vladimir Putin yang cenderung memberlakukan system demokrasi terpusat atau terpimpin dan implikasi dari system demokrasi tersebut bagi Rusia. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis akan sedikit membahas beberapa kejadian atau tindakan yang dilakukan Putin atau pemerintahan sebelumnya yang mempengaruhi perkembangan demokrasi dan yang masih berhubungan dengan upaya Putin untuk membawa Rusia kearah yang lebih baik. Seperti kebijakan-kebijakan yang telah di berlakukan oleh Putin.

H. Tekhnik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data melalui tekhnik pengumpulan data baik dari studi pustaka atas berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, kliping, internet, maupun dokumentasi lainnya yang memuat informasi tentang demokrasi Rusia dan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab.

Bab I : Pendahuluan;berisikan Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: “Republik Federasi Rusia”, menjelaskan secara umum Negara Federasi Rusia, Sejarah Terbentuknya Negara Federasi Rusia, Struktur Pemerintahan Federasi Rusia, Sistem Pemilu dan Partai-partai Besar di Rusia. Dan Pemilu Pasca-Komunisme.

BabIII: “Rusia Pada Masa Kepemimpinan Vladimir Putin.” Berisikan Profil Vladimir Putin; Gambaran Pemerintahan Vladimir Putin; Potret Demokrasi dibawah kepemimpinan Putin.

Bab IV:“Dampak Kepemimpinan Vladimir Putin”. Berisikan penjelasan dampak kepemimpinan Vladimir Putin terhadap perkembangan demokrasi Rusia.

Bab V:“Kesimpulan” Pada bagian ini berisikan rangkuman dari bab-bab sebelumnya, dan juga merupakan penutup dari penulisan skripsi ini.